

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab I akan berisikan pembahasan terkait latar belakang masalah yang menyangkut organisasi FAO dan krisis pangan di Nigeria secara singkat. Lalu diikuti dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

### **A. Latar Belakang**

*Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan organisasi spesialisasi yang didirikan di Kanada tahun 1945 dan hingga saat ini sekitar 194 negara telah menjadi anggota FAO. Dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), FAO bergerak dalam sektor pangan dan pertanian. Orientasi tujuan organisasi ini adalah untuk menjamin dunia terlepas dari kelaparan dan malnutrisi, mengurangi kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan. Dalam menjalankan programnya, dana yang digunakan diperoleh dari dana pribadi serta kontribusi dari Negara-negara anggota dan UNDP. FAO diinisiasikan sebagai pihak netral dalam sebuah forum dan sebagai sumber informasi penting dalam sektor pangan dan pertanian.

FAO hingga saat ini telah mendirikan kantor cabang di lebih dari 150 negara di berbagai belahan dunia. Dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi internasional spesialis, FAO telah melaksanakan berbagai upaya penanganan terhadap isu kemiskinan dan krisis pangan di berbagai negara seperti Kenya, Sudan, Somalia, Ethiopia, Republik Kongo, Bangladesh, Zimbabwe, Sierra Leone dan Afghanistan (FAO, 2017).

Tugas FAO erat hubungannya dengan isu-isu yang menyangkut kemanusiaan khususnya isu krisis pangan. Krisis pangan merupakan suatu fenomena ketidakmampuan individu dalam memperoleh pangan karena tidak tersedianya pangan atau masalah daya beli. Fenomena ini merupakan salah satu masalah besar karena berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup umat manusia dan hingga saat ini krisis pangan masih belum dapat teratasi sepenuhnya di beberapa negara khususnya di kawasan Benua Afrika. Tingginya angka kemiskinan menjadi faktor utama suatu Negara mengalami krisis pangan dan Negara-negara di kawasan Benua Afrika mayoritas memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kelaparan yang tinggi (Hunger, 2018). Dalam hal ini, FAO selalu ikut serta dalam penanganan krisis pangan yang mana salah satunya di Nigeria.

Nigeria merupakan anggota FAO sejak tahun 1960 dan salah satu negara terbesar di kawasan Afrika Barat yang berbatasan dengan Benin, Chad, dan Kamerun. Negara ini memiliki jumlah penduduk lebih dari 190 juta orang dengan sistem pemerintahan federal (Worldometers, 2018). Menurut divisi administrasi, Nigeria memiliki satu wilayah ibukota federal yaitu Abuja dan 36 negara bagian lain. FAO sendiri telah mendirikan kantor cabang di Nigeria sejak tahun 1978 dengan tugas untuk memberikan dukungan dalam pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan keamanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Selama 40 tahun keberadaannya di Nigeria, FAO telah menjalankan berbagai program bantuan dan pengembangan kepada masyarakat. Sejak tahun 1976 hingga tahun 2012 telah berhasil mengimplementasikan sekitar 111 proyek dengan dana total sekitar 70 juta USD. Program yang dilaksanakan mencakup pengembangan teknis, pembuatan kebijakan, tanggap darurat dan rehabilitasi dalam bidang pertanian dan sumber daya alam (FAO, 2018).

Berkaitan dengan ketahanan pangan dan kasus krisis pangan, Nigeria merupakan salah satu negara yang masih memiliki tingkat krisis pangan yang cukup tinggi meskipun telah memiliki badan FAO. Menurut data UN OCHA tahun 2017, Nigeria mengalami krisis pangan serius. Terdapatnya sekitar 5,1 juta penduduk yang diantaranya anak-anak mengalami gizi buruk dan kekurangan pangan (Sulistiowati, 2017). Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat kinerja dari FAO itu sendiri. Adapun faktor utama terjadinya krisis pangan di Nigeria disebabkan oleh konflik dan perubahan iklim.

Faktor utama penyebab terjadinya krisis pangan adalah terjadinya konflik berkepanjangan. Konflik ini merupakan konflik internal yang melibatkan kelompok ekstremis Boko Haram dengan pemerintah Nigeria. Boko haram sendiri merupakan salah satu kelompok terorisme di bagian Nigeria Timur-laut yang dibentuk tahun 2002 dengan tujuan untuk mendirikan negara islam berdasar hukum syariah (Walker, 2012). Kelompok ini awalnya hanya sebagai kelompok oposisi yang menyuarakan pendapat mereka dengan cara dakwah mengenai sistem pemerintahan di Nigeria yang dianggap kurang adil dalam mengelola sumber daya.

Akan tetapi semakin lama kelompok ini berjalan menyimpang dari tujuan awal mereka dan dikemas sebagai kelompok terorisme oleh dunia internasional setelah menjadi sorotan dunia sejak tahun 2009 dimana Boko Haram mengakibatkan kematian dan kerusakan parah di beberapa wilayah Nigeria.

Konflik yang terjadi antara kelompok Boko Haram dengan pemerintah menimbulkan dampak buruk tidak hanya kepada lingkungan sekitar melainkan juga manusia yang ada di dalamnya, serta mengganggu kelangsungan hidup terutama akses pangan masyarakat. Selama konflik terjadi, sumber produksi masyarakat menurun drastis dikarenakan sarana produksi pangan seperti ladang pertanian ataupun perkebunan mengalami kerusakan. Selain itu serangan konflik juga mengakibatkan tewasnya hewan ternak masyarakat. Tidak adanya sumber produksi makanan serta rusaknya fasilitas mengakibatkan banyak masyarakat Nigeria mengalami gangguan kesehatan dan berakhir dalam kondisi kelaparan yang cukup parah.

Boko Haram kerap melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk dijadikan kawasan pertahanan. Kawasan yang pernah dijadikan sebagai tempat pertahanan Boko Haram antara lain Borno, Yobe, Adamawa, hingga berita terakhir menyebutkan kelompok ini menetap di Pegunungan Mandara. Keberadaan kelompok ini menghambat program bantuan FAO untuk masyarakat Nigeria di kawasan-kawasan tersebut karena sistem keamanan menghalangi adanya bantuan-bantuan kemanusiaan dari pihak luar untuk masuk ke dalam daerah teritorialnya. Sedangkan berdasarkan laporan dari UNICEF, terdapat sekitar 75.000 anak yang berada di kawasan bekas pertahanan Boko Haram yaitu Borno, Yobe, dan Adamawa berada dalam keadaan terancam mati karena kekurangan makanan (Widuri, 2016).

Perubahan iklim yang ekstrem menjadi faktor lain terjadinya krisis pangan. Perbedaan temperatur yang signifikan antara wilayah utara dan selatan, serta bencana alam yang terjadi berdampak buruk pada produksi pertanian. Bencana banjir yang melanda sejumlah negara bagian mengakibatkan kerusakan pada lahan pertanian, fasilitas umum, dan hilangnya hewan ternak. Faktor alam yang kurang baik dan berkurangnya produksi pangan masyarakat kemudian

menyebabkan kenaikan harga pada pangan. Hal ini tidak sepadan dengan kondisi ekonomi penduduk Nigeria yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dimana terdapat sekitar 82 juta penduduk masih hidup dibawah kemiskinan (Ajakaye, 2017).

Meskipun mendapat julukan sebagai *The Giant of Africa* karena pendapatan GDP yang terus meningkat, disisi lain masih banyak negara-negara bagian yang memiliki pendapatan rendah bahkan dikatakan miskin. Biro statistik Nigeria menetapkan beberapa negara bagian dengan tingkat kemiskinannya yakni negara bagian Sokoto (81,2%), Katsina (74,5%), Adamawa (74,2%), dan Jigawa (74,1%) (Belux, 2018). Pendapatan masyarakat Nigeria juga masih tergolong sangat rendah. Menurut penelitian dari Ikelegbe OO dan DA Edokpa, hanya 14% dari masyarakat Nigeria terutama pedesaan Benin memperoleh penghasilan lebih dari 133 US \$ setiap bulannya sedangkan 86% masyarakat memperoleh penghasilan kurang dari 67 US \$ tiap bulannya (OO & Edokpa, 2015).

Tantangan lingkungan, perubahan iklim, dan pertumbuhan populasi memberi tekanan pada sumber daya alam Nigeria. Ini diperparah oleh bencana alam dan yang disebabkan oleh manusia, yang sering berakibat pada mundurnya pembangunan. Melalui *Country Programing Framework* (CPF), FAO menetapkan prioritas untuk memandu pemerintah Nigeria untuk mencapai nutrisi pangan dan keamanan nasional yang berkelanjutan, serta memposisikan kembali pertanian sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja untuk periode lima tahun (2013-2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimana peran FAO dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria pada tahun 2016-2018?”

## **C. Kerangka Pemikiran**

Dalam penulisan ini, penulis menjawab rumusan masalah dengan menggunakan Konsep Organisasi Internasional dan Konsep *Food Security*.

### **1. Konsep Organisasi Internasional**

Menurut Kelly Kate D Pease dalam bukunya “*International Organizations: Perspectives on Governance in the twenty-fourth century*”, organisasi internasional secara tradisional dipahami sebagai institusi formal yang beranggotakan banyak negara. Organisasi internasional juga dibedakan menjadi 3 yakni (Pease, 2010):

#### 1) *Intergovernmental organization* (IGO)

Organisasi ini mudah diidentifikasi karena tujuan, struktur dan prosedur pembuatan keputusan yang jelas tertuang dalam perjanjian ataupun piagam. IGO memiliki anggota yang terbatas dan dapat digolongkan berdasarkan tujuannya. IGO memiliki status hukum dibawah hukum internasional.

#### 2) *International non-governmental organization* (INGO)

INGO adalah sebuah organisasi non-profit yang terlibat dalam aktivitas internasional. Organisasi jenis ini bisa berorientasi hanya pada satu isu atau memiliki banyak tujuan dalam agendanya. INGO berpartisipasi dengan cara

menentukan tujuan, menyediakan informasi, dan memberikan pendapat dalam forum politik internasional. Organisasi ini juga mendapat bantuan dana yang diperoleh dari pemerintah sehingga dalam kegiatannya INGO dapat bekerja sendiri maupun bersama dengan IGO.

### 3) *Multinational corporation (MNC)*

*Multinational corporation* merupakan firma berorientasi keuntungan dan berkaitan dengan aktivitas produksi meliputi laju barang dan jasa melewati batas-batas nasional.

Organisasi internasional juga merujuk kepada institusi-institusi, proses, norma, hukum, dan rezim yang terdiri dari negara dan aktor non-negara. Hal ini berkaitan dengan FAO karena merupakan organisasi internasional yang tergolong dalam *Intergovernmental organization (IGO)*. FAO memiliki anggota yang terdiri dari negara dan berfokus pada isu tertentu yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan dengan cara promosi pengembangan pertanian, meningkatkan nutrisi, dan pengejaran terhadap ketahanan pangan (UN, 1998).

Selain itu, Organisasi Internasional dalam suatu kasus memiliki peran penting seperti yang dicetuskan oleh Clive Archer dalam bukunya "*International Organization*". Archer menyebutkan peran organisasi internasional terbagi menjadi 3 kategori antara lain (Archer, 1984):

- a) Organisasi Internasional menjadi salah satu instrumen atau alat yang digunakan oleh beberapa negara anggotanya untuk mencapai tujuan berdasarkan politik luar negeri.
- b) Organisasi Internasional menjadi sarana tempat berkumpulnya negara-negara anggota guna untuk berdiskusi mengenai isu atau masalah yang sedang

melanda dunia, selain itu tak jarang beberapa negara akan menyampaikan mengenai masalah dalam negerinya.

- c) Organisasi Internasional bersikap netral dan independen sehingga mampu mengeluarkan keputusan sendiri tanpa keterlibatan ataupun paksaan dari pihak luar organisasi.

Dari kategori peranan tersebut, analisis dan eksplorasi yang dilakukan Organisasi Internasional akan menunjukkan sejumlah peranan lain yaitu sebagai fasilitator, inisiator, mediator atau rekonsiliator, dan determinator (Pareira, 1999). Adapun penjelasan mengenai peran tersebut adalah:

- a) Fasilitator. Sebagai fasilitator, organisasi internasional berperan menyediakan fasilitas penunjang penyelesaian masalah sehingga mampu merealisasikan tujuan.
- b) Inisiator. Sebagai inisiator, organisasi internasional berperan mengajukan suatu masalah atau fenomena kepada komunitas internasional dalam sebuah forum untuk memperoleh sebuah kerjasama dan solusi penyelesaian. Kerjasama ini dapat dilakukan baik dengan negara, komunitas masyarakat atau internasional, dan individu.
- c) Determinator. Sebagai determinator, peran organisasi internasional yaitu memberi serta mengambil keputusan terhadap suatu masalah.
- d) Mediator atau rekonsiliator. Sebagai mediator atau rekonsiliator, organisasi internasional berperan sebagai pihak penengah dalam suatu masalah maupun konflik yang terjadi antar anggota.

FAO sebagai organisasi internasional memiliki status sebagai arena berkumpulnya negara-negara anggota dalam sebuah forum dimana dalam forum tersebut lebih mengutamakan diskusi perihal masalah kemiskinan dan



kelaparan yang terjadi di belahan dunia. Selain itu FAO juga bersifat netral dalam suatu situasi menjadikan organisasi internasional ini tidak memihak pada negara manapun dan murni bekerja untuk mencapai tujuan.

Dalam mewujudkan tujuannya, FAO berperan menjadi fasilitator dengan cara memberikan fasilitas serta merancang program bantu untuk masyarakat dan petani kecil melalui pelatihan agar mampu memproduksi bahan pangan sendiri. Selain itu FAO juga sebagai pihak inisiator yang mana FAO melakukan kerjasama dengan Negara anggota dan organisasi masyarakat maupun kemanusiaan lain untuk menciptakan ketersediaan pangan dan memperoleh bantuan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi.

## **2. Konsep *Food Security***

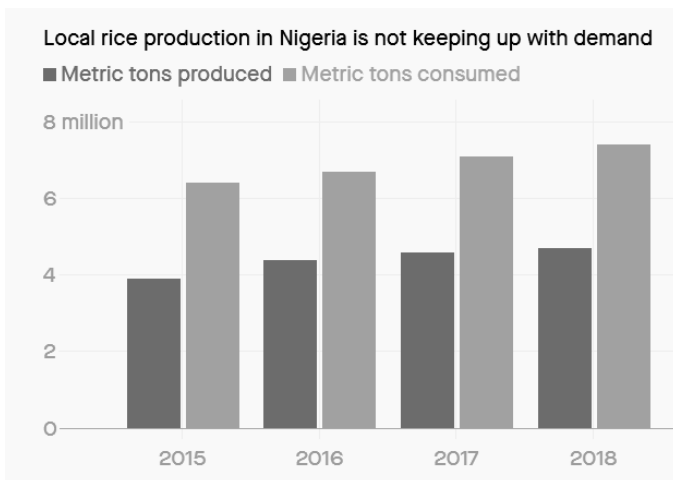
*Food security* atau ketahanan pangan pada umumnya difahami sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara fisik dan ekonomi. Pengertian ketahanan pangan menurut UU Indonesia No.7 Tahun 1996 adalah suatu kondisi dimana tercukupinya pangan baik dari segi jumlah, mutu, dan terjangkau. *World Food Summit* (1996) menyatakan bahwa ketahanan pangan akan tercapai apabila semua orang baik individu maupun keluarga secara terus-menerus memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi untuk hidup yang aktif dan sehat (Ridder, 2011).

*Food and Agriculture Organization* (FAO) mengidentifikasi 4 dimensi utama dari konsep *food security*, yaitu:

## 1. Ketersediaan pangan (*food availability*)

Ketersediaan pangan meliputi masalah tercukupinya jumlah pangan yang berkualitas termasuk juga bantuan pangan baik yang dipasok melalui produksi domestik maupun import. Nigeria dikenal sebagai konsumen beras terkemuka karena menjadi salah satu produsen beras terbesar sekaligus importir beras terbesar di dunia. Oleh karena itu beras menjadi salah satu makanan pokok yang paling utama dan banyak dikonsumsi masyarakat dari berbagai kalangan. Dalam decade terakhir seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kebutuhan ketersediaan makanan pokok terutama beras ikut meningkat. Pada tahun 2017, setidaknya dibutuhkan sekitar 6,4 juta ton metrik beras untuk dikonsumsi 190 juta penduduk dalam kurun waktu 9-12 bulan (Oladipo, 2018). Adanya konflik internal serta perubahan iklim yang tak menentu menjadikan masyarakat Nigeria mengalami kerugian akibat dampak dari fenomena tersebut yang meliputi kerugian ternak dimana kondisi kesehatan ternak terus memburuk, rusaknya lahan pertanian, fasilitas pasar dan irigasi yang kemudian menyebabkan hilangnya aset produksi pangan. Selain itu Nigeria mengalami masalah dalam memenuhi ketersediaan makanan pokok dimana jumlah beras yang diproduksi tiap tahunnya jauh dibawah angka kebutuhan konsumsi (Kazeem, Nigerians love rice but don't grow enough so even 70% tariffs haven't slowed imports, 2019).

**Grafik 1. 1 Produksi beras lokal di Nigeria**



Sumber: <https://www.theatlant.com/charts/S1E4zyCQ4>

Sejak tahun 2015, angka produksi beras jauh dibawah angka konsumsi atau permintaan dan berlangsung hingga tahun 2018 dimana para petani hanya mampu memproduksi sekitar 4 juta metrik ton beras sedangkan permintaan mencapai hampir 7 juta metrik ton. Sampai pada Agustus 2017 Norwegian Refugee Council (NRC) menyatakan bahwa setidaknya terdapat sekitar 5,2 juta penduduk Nigeria membutuhkan bantuan pangan karena tidak adanya hasil tani (Guilbert, 2017).

## 2. Akses pangan (*food access*)

Tersedianya pasokan pangan yang cukup tidak menjamin terpenuhinya ketahanan pangan apabila tidak ada akses dalam memperoleh pangan. Dalam hal ini setiap individu memiliki hak baik secara politik, sosial, dan ekonomi untuk memiliki akses dalam memperoleh pangan yang bergizi. Akses pangan di Nigeria dapat dikatakan masih belum merata

terutama pada wilayah Borno, Yobe, dan Adamawa yang menjadi wilayah dengan krisis pangan ekstrim menurut laporan FAO karena pada saat kelompok boko haram menguasai wilayah tersebut, pihak luar sulit untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga akses antar keduanya tertutup selain itu harga pangan yang tinggi turut menyulitkan masyarakat. Para petani pun merasa tidak aman untuk melakukan aktivitas di lahan pertaniannya sehingga wilayah tersebut mengalami penipisan pasokan pangan maupun produksi.

### 3. *Utilization*

*Utilization* meliputi pemanfaatan makanan melalui pola yang memadai, air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan gizi dimana serta kualitas pola makan dapat dipenuhi baik secara makronutrisi dan mikronutrisi (Division, 2006). Rusaknya lingkungan akibat konflik mendorong kesulitan memperoleh air bersih di beberapa negara bagian, selain itu berbagai wabah penyakit mulai muncul hingga malnutrisi yang mayoritas diderita oleh anak-anak.

### 4. Stabilitas ketersediaan dan akses pangan (*Stability*)

Individu masih dianggap dalam kondisi tidak aman dalam pangan apabila tidak mampu mendapatkan akses terhadap pangan secara periodik. Perubahan iklim yang cenderung merugikan, kondisi ekonomi yang buruk, maupun instabilitas politik dapat mengganggu akses pangan individu yang kemudian dapat memberikan resiko terhadap penurunan gizi individu. Stabilitas masyarakat dalam memperoleh pangan di Nigeria terancam bukan hanya karena adanya konflik internal saja, melainkan juga adanya perubahan iklim yang tak menentu. Nigeria diakui rentan terhadap perubahan iklim yang sangat ekstrim seperti peningkatan suhu, kekeringan, dan banjir besar. Perubahan iklim ini tentunya memberikan

dampak buruk terhadap produksi pertanian, kesehatan ternak dan masyarakat, serta ketersediaan air bersih (Idowu, Ayoola, Opele, & Ikenweuwe, 2011).

Dalam hal ini sorotan utama program FAO adalah masalah ketersediaan pangan dan stabilitas ketersediaan/akses pangan. FAO membentuk program dengan berusaha menciptakan ketersediaan pangan baik melalui bantuan dari negara lain maupun dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat mampu memproduksi pangan sendiri. Program pemberdayaan yang dijalankan juga mampu menjaga stabilitas akses masyarakat dalam memperoleh pangan secara mudah dalam jangka waktu panjang sehingga mampu menghindari terjadinya malnutrisi pada masyarakat terutama anak-anak. Selain itu FAO merancang program musim tanam yang mana diharapkan mampu membantu para petani dalam mengantisipasi terjadinya perubahan cuaca.

#### **D. Hipotesa**

Dari rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan, ditarik hipotesa yakni FAO sebagai organisasi internasional dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria berperan sebagai:

1. Fasilitator untuk menjaga stabilitas akses pangan masyarakat dengan melakukan program pelatihan pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan hasil produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam.
2. Inisiator untuk memperoleh kerjasama dengan negara dan organisasi kemanusiaan lainnya sehingga mampu menjamin terpenuhinya ketersediaan pangan.

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai krisis pangan yang terjadi di Nigeria beserta faktor-faktor penyebabnya.
2. Untuk mendeskripsikan peran FAO sebagai Organisasi Internasional dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian meliputi peran FAO dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria. Rentan waktu yang digunakan peneliti sebatas tahun 2016-2018.

## **G. Metode Pengumpulan dan Analisis Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Peneliti menggunakan data berdasarkan studi literatur seperti buku, jurnal, majalah, surat kabar, serta data digital website yang terkait dengan topik bahasan.

### **2. Metode Analisis Data**

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis data bersifat kualitatif. Metode ini menggunakan data eksplanasi yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan topik yang dibahas dengan teori yang digunakan.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan dibagi menjadi 4 bab urutan dan deskripsi sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari antara lain latar belakang masalah yang menyangkut organisasi FAO dan krisis pangan di Nigeria secara singkat. Lalu diikuti dengan rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan mengenai profil *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai organisasi internasional. Bab ini meliputi pembahasan terkait latar belakang pembentukan organisasi, visi dan misi, tujuan dan fungsi, struktur organisasi, sumber dana yang diperoleh, mitra kerja, serta program universal FAO sebagai salah satu organisasi spesialis di bidang pangan dan agrikultur.

Bab III akan membahas mengenai Nigeria dan kasus krisis pangan. Dimulai dari menjelaskan sedikit mengenai sejarah pembentukan negara Nigeria dan profil Nigeria saat ini baik dalam segi alam dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kondisi krisis pangan yang terjadi serta faktor yang menyebabkannya.

Bab IV akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Data-data mengenai bentuk peran FAO akan disampaikan pada bab ini. Bentuk peran yang dijalankan *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai organisasi internasional dalam mengatasi krisis pangan di Nigeria akan dijelaskan secara rinci.

Bab V berisi kesimpulan yang memuat poin-poin dari topik bahasan di bab-bab sebelumnya. Saran dan harapan untuk penelitian penulis terhadap penelitian berikutnya akan disampaikan pula dalam bab ini. Selain itu kesimpulan juga menjadi penanda berakhirnya skripsi ini.